

## Daftar Pustaka

- Black, Henry Campbell, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Minnesota
- Badruzaman, Darus Mariam, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Surjadi, John dan Koentjoro, 1987, *Kamus Inggris Jepang Indonesia*, Indah Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, A., 1995, *Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia)*, Pustaka Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Daya Widya, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardjin, Bandung.
- Soekanto, Soeryono, dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Widjaja, G., dan Yani, A., 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### **Daftar Makalah**

Baswir, Revrisond., 1998, *Harga Listrik dan Kenaikan Tarif Dasar Listrik*, Balai Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta.

Sirait, 1998, *Mengapa PLN Harus Menaikan Tarif Listrik Ditengah Krisis Ekonomi*, Balai Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta.

Waluyo, B. M., *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Tri wulan, 19 No. 4, 2001.

Widijantoro, J, 2001, *Product Liability dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1999, *Pokok-pokok Pikiran YLKI Terhadap Kondisi Pelayanan Listrik*, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1991 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1994 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

- Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1836 K/36/MEN/2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara .
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 114-12/39/600.2/2002 tentang Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Umum Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Persero).
- Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 081.K/010/DIR/2002 tentang Penetapan Mutu Pelayanan dan Penyediaan Tenaga Listrik di Unit-Unit PT. PLN (Persero) Sesuai Indikator Pelayanan.
- Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Nomor: 003.K/021/GM.DJBB/2004 tentang Pola Organisasi dan Uraian Fungsi Organisasi Jenjang Ketiga Pada Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ), Unit Pelayanan TT/TM (UP TT/TM) dan Unit Jaringan (UJ) di Lingkungan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.